

## PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TOMPASO DUA UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA

*Prisky Pola<sup>1</sup>*  
*Johannis Kaawoan<sup>2</sup>*  
*Josef Kairupan<sup>3</sup>*

### Abstrak

Pemilihan Kepala Desa pada umumnya mendapat campur tangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dimana hal ini berdampak pada pelaksanaan demokrasi ditingkat Desa tidak seperti yang diharapkan dan masih banyak yang dijadikan alat bagi para kelompok tertentu untuk penguasaan dan memperkaya diri maupun kelompok tertentu, dan tidak lagi untuk menyejahterakan. Rakyat Desa karena memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, sehingga begitu rentan dan mudah dieksploitasi oleh kuasa politik dan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Tompaso Dua Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode kualitatif, penelitian sama-sama mempersoalkan realibilitas, validitas, pengukuran dan alat ukur juga berbeda. Dan hasil ini masyarakat Desa yang menganut paham demokrasi, maka keberadaan para tokoh tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. terdapat beberapa proses sosial yang mendorong perkembangan tokoh masyarakat yakni pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal dan perkembangan keagamaan moral. Tokoh masyarakat karena terdiri dari orang-orang yang mempunyai posisi strategis di bidang kemasyarakatan strategis, sehingga memiliki pengaruh memperoleh kekuasaan mengontrol dan mempengaruhi orang lain karena ketokohnya.

**Kata kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pemilihan**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pemilihan kepala Desa merupakan pesta rakyat, dimana pemilihan kepala Desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat Desa. Masyarakat Desa memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin di Desanya. Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari partisipasi politik masyarakat Desa. Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan untuk kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya ke dalam simbol-simbol pribadi atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (individual reference, social references) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku. Pemilihan Kepala Desa pada umumnya mendapat campur tangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dimana hal ini berdampak padapelaksanaan demokrasi ditingkat Desa tidak seperti yang diharapkan dan masih banyak yang dijadikan alat bagi para kelompok tertentu untuk penguasaan dan memperkaya diri maupun kelompok tertentu, dan tidak lagi untuk menyejahterakan. Rakyat Desa karena memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, sehingga begitu rentan dan mudah dieksploitasi oleh kuasa politik dan modal. Desa yang memiliki kewenangan yang jelas dan diakui secara legal sebagaimana dalam Undang-

Undang, hal ini selaras dengan pengertian bahwa demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat penting mengingat potensi kekuasaan elit Desa yang tidak terkontrol. Desa dengan institusi-institusi supra Desa dalam kerangka otonomi dan kewenangan Desa, semestinya perlu meletakkan kedaulatan pada rakyatnya, bukan pada penguatan kekuasaan kelompok tertentu. Pada fakta di lapangan bahwa proses politik dalam pemilihan kepala Desa bukan merupakan proses demokrasi, melainkan proses dominasi, dimana kekuatan-kekuatan tertentu yang juga dimainkan oleh tokoh masyarakat mendominasi sistem pemerintahan Desa, disebut proses dominasi karena proses politik mengarah pada pembentukan dominasi kekuasaan Desa yang dilakukan oleh elit sosial, ekonomi dan politik Desa terhadap keseluruhan warga Desa. Proses ini juga memanfaatkan alat-alat kekuasaan Desa untuk mengatur kebijakan melalui pemerintahan Desa, dan mempengaruhi masyarakat Desa agar tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Desa itu. Seringkali Desa merupakan perpanjangan tangan dari birokrasi di atasnya dan meneruskan pesan yang lebih sering berupa perintah yang diterapkan pada warga masyarakat Desa. Merekalah yang terlibat di dalam proses pengimbangan atau pengendalian terhadap masyarakat yang lain, sehingga berbagai kepentingan dari berbagai pengikut kelompok bisa terpelihara. Senantiasa adanya dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan yang memici elit politik atau kelompok-kelompok tokoh masyarakat untuk memainkan peranan aktif dalam politik. Seperti halnya

dengan kekuasaan Desa yang dilakukan oleh elit lokal, dimana setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai kualitas dalam mengarahkan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan pada pemilihan kepala Desa. Melalui pemilihan kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa memperebutkan kekuasaan yang ada di Desa tersebut untuk membuat dan menjalankan segala aturan-aturan yang akhirnya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Setiap calon Kepala Desa juga menghimpun dukungan dari tokoh masyarakat yang ada di Desa. Mereka ini adalah seperti elit ekonomi, elit sosial, dan juga elit politik. Para elit-elit yang ada di Desa yang pada akhirnya menghimpun suara untuk calon Kepala Desa. Dimana dalam pengumpulan masyarakat tentunya keberadaan para tokoh masyarakat yang ada di Desa dalam menghimpun masyarakat akan semakin meyakinkan masyarakat pada calon Kepala Desa tersebut. Disamping itu para tokoh masyarakat di Desa juga mampu menjangkau pusat kekuasaan sosial dan politik, dimana dalam hal ini adalah kepala Desa di tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan. Kepala Desa memainkan peranan aktif dalam sistem politik yang disebabkan adanya kekuasaan yang diakui oleh masyarakat yang berdampak pada seluruh lapisan, termasuk pada lapisan ekonomi sehingga memunculkan para elit local di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan Desa hingga pada penentuan pemerintahan Desa itu sendiri. Hal ini dikarenakan, para tokoh masyarakat yang mendominasi sumber-sumber kekuasaan, sehingga mampu memegang kendali atas pemerintahan

Desa. Seperti halnya pada pemilihan kepala Desa di Desa Tompaso II Utara, kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 lalu, dimana tokoh masyarakat turut berperan dalam mengarahkan pilihan masyarakat Desa kepada satu calon tertentu. Pada saat pemilihan kepala Desa terlihat peran tokoh masyarakat memainkan wacana dalam penentuan kepada salah satu kandidat calon Kepala Desa, selain itu terdapat juga peran dari kalangan tokoh masyarakat yang mengarahkan masyarakat Desa untuk menjatuhkan pilihannya pada satu calon tertentu, dimana pihak yang mencalonkan diri tetap merupakan bagian dari pelaku tokoh masyarakat tersebut. Fenomena yang diuraikan tersebut menarik perhatian peneliti, sebagaimana lazimnya yang terjadi di Kecamatan Tompaso, masyarakat Desa turut memberikan perhatian lebih dari ketokohan orang tertentu dalam lapisan masyarakat yang biasanya disebut sebagai tokoh masyarakat, tak dapat dipungkiri pula bahwa ketokohan dari para tokoh masyarakat ini mempengaruhi sebagian masyarakat Desa, termasuk masyarakat yang ada di Desa Tompaso II Utara, tidak sedikit pula masyarakat yang mau mengikuti apa yang diarahkan oleh tokoh masyarakat ini, secara tidak langsung pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh tokoh masyarakat turut menentukan perolehan hasil pemilihan Hukum Tua di Desa Tompaso II Utara.

## **Tinjauan Pustaka**

Pengertian Peran Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2010:243), yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto, 2010: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata (Soerjono Soekanto, 2010:232). Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. (Miftah Thoha, 2007:58). Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, peran

meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Miftah Thoha, 2007:58). Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 2007:58). Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan tokoh masyarakat,

peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan pengaruh yang diberikan karena ketokohnya.

## Konsep Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Pertanyaan yang kemudian yang muncul adalah, siapakah tokoh masyarakat itu? Apa saja kaitan antara tokoh masyarakat dengan perkembangan masyarakat? Menurut Surbakti (2008:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal

Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. 5 Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. Pertama, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Surbakti (2008:45) Pemimpin tidak hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. Kedua, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula. Pada pihak lain tidak hanya di Negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga di Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil sebagai "wakil" atau personifikasi bangsa di dalam maupun di luar negeri Surbakti (2008:45) Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di daerah tempatnya bermukim. Masyarakat tentunya menurut Wikipedia bahasa Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>), Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok

orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

## Metode Penelitian

Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian, penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode kualitatif, penelitian sama-sama mempersoalkan realitas, validitas, pengukuran dan alat ukur juga berbeda (Burhan Bungin, 2005:71). Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi dan juga bersifat komperatif dan korelatif (Abu Achmadi dkk, 2007:44). Secara khusus penelitian deskriptif yang penulis gunakan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Fakta atau data yang ada dikumpulkan, diklarifikasi dan kemudian akan dianalisa. Penelitian ini difokuskan pada peran tokoh masyarakat pada pemilihan Hukum Tua Desa Tompaso II Utara, yaitu mempengaruhi dan menggerakkan massa agar dapat mengikuti pengaruh yang diperankan oleh tokoh masyarakat tersebut, yang dikaji menurut pendapat Soekanto (2010:242), yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Aktivitas tokoh masyarakat pada pemilihan hukum tua
2. Dominasi tokoh masyarakat pada pemilihan hukum tua
3. Kepentingan tokoh masyarakat pada pemelihan hukum tua

informan, yaitu:

- a. Kepala Desa/Hukum Tua terpilih.
- b. Tim Sukses Calon Hukum Tua.
- c. Tokoh masyarakat.

Alasan memilih narasumber ini, adalah karena mereka merupakan tokoh yang berperan dalam pemilihan hukum tua, dan juga sebagai penggerak massa dalam pemilihan kepala Desa pada tahun 2016.

## Hasil Penelitian

Pemilihan Kepala Desa pertama kali dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2012. Dimana pada setiap proses yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari para tokoh dan wiraswasta yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam pemekeran Desa. Para wiraswasta ini jugalah yang menjadi calon Kepala Desa di Desa Tompaso II Utara. Dalam pemilihan Kepala Desa Tompaso II Utara, panitia pemilihan memberikan kesempatan pada masyarakat Desa untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala Desa. Kesempatan yang diberikan panitia pemilihan kepada masyarakat Desa adalah selama 14 (empat belas) hari atau selama 2 (dua) minggu. Setelah menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa, panitia kemudian melakukan seleksi terhadap bakal calon tersebut. Proses seleksi bakal calon didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia. Syarat-syarat yang ditentukan panitia pemilihan untuk calon kepala Desa adalah yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) dan atau berpengetahuan yang sederajat.

d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

e. Tidak pernah di hukum penjara melakukan tindakan pidana.

f. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.

h. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

i. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

j. Belum pernah menjabat kapala Desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan.

Pada masa pendaftaran calon Kepala Desa Tompaso II Utara, kelompok elit ekonomi yang ada di Desa Tompaso II Utara terlebih dahulu telah menyepakati siapa yang akan menjadi calon Kepala Desa, dan pada akhirnya kelompok elit ekonomi ini mendorong Bapak J. R. Pola menjadi calon Kepala Desa. Akan tetapi beberapa juga tidak menginginkan pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh satu calon, maka sebagian masyarakat menginginkan jika pada pemilihan Kepala Desa harus mengikutsertakan satu calon Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak N. H yang mengatakan bahwa: "Pemilihan Kepala Desa Tompaso II Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2012, memang pada awalnya dilakukan hanya dengan satu calon Kepala Desa, akan tetapi melihat hal tersebut, saya tidak menginginkan jika pemilihan Kepala Desa dilaksanakan hanya dengan satu calon menjadi Kepala Desa. Jangan sampai hal ini nantinya mengurangi minat masyarakat ataupun

masyarakat menjadi tidak mau tahu tentang apa yang terjadi dalam setiap program Desa kedepannya". Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Bapak P. T yang mengatakan bahwa: "Pada saat Pemilihan Kepala Desa adanya dua calon Kepala Desa tidak terlepas dari para wiraswasta (elit/tokoh) yang ada di Desa ini. Para wiraswasta yang sudah mempunyai hubungan tersendiri, dimana para wiraswasta mempunyai bidang pekerjaan yang saling berkaitan". Hal ini juga seperti pernyataan Bapak D. S yang mengatakan bahwa: "Dengan melihat peran dari tokoh masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan Desa, saya dengan beberapa wiraswasta lainnya mendorong mereka untuk menjadi calon Kepala Desa. Tetapi untuk hal yang lain dalam pemilihan, saya sendiri menyerahkan kepada masyarakat. Agar nantinya pada pemilihan Kepala Desa tidak terjadi perbedaan antar masyarakat Desa. Para wiraswasta memang ada yang mendukung salah satu calon, tetapi hal ini tidak terlalu menonjol, dan setiap para wiraswasta berkumpul di satu tempat, hubungan kami tetap terjalin dengan baik, bahkan sampai saat ini ". Setelah calon Kepala Desa sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disahkan dalam sidang badan Permusyawaratan Desa, maka proses selanjutnya adalah masa kampanye. Dimana pada masa kampanye calon Kepala Desa menyampaikan visi misinya pada masyarakat. Dan Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 21-30 September 2012. Pada saat masa kampanye inilah para calon Kepala Desa menarik simpatik masyarakat. Dimana pada saat proses Pemilihan

Kepala Desatentunya masyarakat terbagi dua, seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Desa Tompaso II Utara: “Pada saat masa kampanye masyarakat Desa Tompaso II Utara terbagi dua, dimana para wiraswasta yang mendorong keduanya menjadi calon Kepala Desa terlihat mendukung salah satu pasangan calon. Para wiraswasta dan tokoh masyarakat mendukung Bapak J.P, sementara yang lainnya mendukung Bapak F. S menjadi Kepala Desa. Mereka yang terlibat mendukung salah satu calon Kepala Desa, tidak terlalu menonjol dalam hal memberikan dukungan. Dimana pada masa kampanye para wiraswasta dan juga tokoh masyarakat tidak melakukan kampanye yang menjatuhkan salah satu calon Kepala Desa. Mereka berkampanye secara sehat dimana mereka lebih mendorong siapa yang lebih baik menjadi Kepala Desa. Hal ini sangat jelas mengurangi konflik yang ada dalam masyarakat”. Keterkaitan antar elit dan tokoh masyarakat sangat mempengaruhi sikap pemilih, dimana dukungan yang diberikan tokoh masyarakat kepada calon kepala Desa tentunya akan memberikan dampak terhadap calon kepala Desa tersebut. Dalam hal ini, calon kepala Desa yang didukung oleh sebagian besar tokoh masyarakat tentunya berpengaruh besar terhadap masyarakat yang akan memilih calon kepala Desa. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2012, dimana dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pada pemungutan suara, seperti pernyataan dari Bapak P. T sebagai ketua panitia pemilihan pada saat itu mengatakan bahwa: “Para tokoh masyarakat sangat

berperan dalam hal mendorong masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara. Mereka datang ke tempat-tempat masyarakat berkumpul sekedar hanya mengatakan agar masyarakat memilih calon Kepala Desa Tompaso II Utara”.

Para pemilik modal dalam pemilihan Kepala Desa Tompaso II Utara saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Disamping memberikan pengaruh kepada masyarakat yang akan memilih calon Kepala Desa juga mengontrol masyarakat dalam agar datang ke tempat pemungutan suara. Dengan kekuasaan ekonomi yang dimiliki para elit ekonomi, sehingga para elit ekonomi dapat mempengaruhi masyarakat mematuhi keinginan dari para elit ekonomi tersebut. Seperti pendapat narasumber diatas, bahwa keberadaan elit ekonomi yang telah berperan dalam pemekaran Desa Tompaso II Utara membuat para elit ekonomi ini mempunyai kekuasaan dalam hal mengajukan calon Kepala Desa. Disamping itu, keterkaitan para elit ekonomi ini memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa. Dalam proses pemilihan kepala Desa, elit ekonomi sangat berperan dalam mendukung calon Kepala Desa. Mulai dari penyumbang modal bagi si calon, dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki bukanlah hal yang sulit untuk memberikan bantuan materi dalam beberapa wujud seperti atribut, biaya operasional, alat peraga kampanye, bahkan pemberian materi secara transaksional. Selain memberikan bantuan materi, peran elit juga terwujud dalam pengaruh pembentukan tim sukses atau juga simpatisan calon. Hingga pada akhirnya, secara keseluruhan peran elit meliputi semua aspek yang berkaitan dengan proses



pemilihan kepala Desa, mulai dari pemberian bantuan modal, pengarahan suara, kontrol pemungutan suara hingga sampai proses penghitungan suara. Melalui teori kekuasaan dan elit, bila disejajarkan dengan apa yang terjadi di DesaTompaso II Utara sangatlah berbanding lurus. Kaum elit ekonomi dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat, akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga dapat dengan mudah ditebak, bahwa siapa yang memiliki derajat lebih tinggi di masyarakat, baik melalui ekonomi, komunitas dan eksekutif, tentu dengan mudah dapat mengatur berjalannya ritme kehidupan sosial dan politik masyarakat.

## Kesimpulan

1. Proses pemilihan kepala DesaTompaso II Utara yang didominasi oleh elit/tokoh yang mempunyai kekuasaan untuk mengontrol masyarakat dalam membentuk pemerintahan Desa. Dimana dengan adanya pemerintahan Desa akan mempermudah tokoh masyarakat masuk dalam pemerintahan dan memberikan pengaruh dalam pemerintahan Desa.
2. Sumber daya kekuasaan sebagai hal yang tentunya harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mencapai kekuasaan politik. Seperti artian yang ada dalam tipe sumber daya ekonomi yang merupakan salah satu dari sumber kekuasaan dimana dalam hal ini diartikan bahwa mereka yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar, setidaknya-tidaknya secara potensial akan memiliki kekuasaan politik. Seperti halnya dalam penelitian ini yang dilakukan di DesaTompaso II Utara bahwa tokoh masyarakat yang berperan

dalam pemilihan kepala Desa memiliki kekuatan dan pengaruh di masyarakat.

## Saran

1. Tokoh masyarakat yang mendukung salah satu kandidat pada pemilihan kepala Desa agar tetap memberikan dampak positif di masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan harus mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa.
2. Tokoh masyarakat harus dapat berkomunikasi dengan masyarakat sehinggakedekatan emosional yang selama ini sudah terbangun tetap terjalin, juga banyak langkah nyata yang harus dikerjakan demi kepentingan masyarakat yang sudah mendukung kandidat kepala Desa yang pada saat ini sudah terpilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dkk. 2007. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Burhan Bungin. 2005. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Air Langga University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto. 2005. Kekuasaan Elite Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- SP. Varma. 2010. Teori Politik Modern. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Maurice Duverger. 2007. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon. 2006. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.
- P. Anthonius Sitepu. 2012. Teori-Teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mochtar Mas'ud dan Colin MacAndrews. 2005. Perbandingan

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah  
Mada University Press.  
Ramlan Surbakti. 2008. Memahami  
Ilmu Politik, Edisi Revisi Cetakan ke-5.  
Jakarta: Grasindo.  
Solekhan, Moch. 2012.  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
Malang: Setara Press.  
Soerjono, Soekanto. 2010. Sosiologi  
Suatu Pengantar. Jakarta: Radar Jaya  
Offset.  
Sutherland, Heather. 2007.  
Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi.  
Jakarta: Sinar Harapan.  
Tarik Ibrahim, Jabal. 2008. Sosiologi  
PeDesaan. Malang: UMM Pres.  
Nasroen. 2005. Daerah Otonomi Tingkat  
Terbawah, Jakarta: Beringin Trading  
Company.